



PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA CANDIMULYO KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018

Hindun Mar'atus Sholihah¹
Pendidikan Akuntansi -FKIP
Universitas PGRI Madiun
Sholihahhindun@gmail.com

Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd²
FKIP/ Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun
supriutomo@yahoo.co.id

Dra. Juli Murwani, M.Si³
FKIP/ Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun
jmurwani@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara atau interview dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah *data reduction*, pemahaman (*understanding*) dan interpretasi, hasil selanjutnya diintegrasikan dalam bentuk naratif dan harus sesuai dengan teori yang ada. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, desa melakukan pertemuan dengan bemusyawarah dengan warga untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Desa (RPJMDes). Dalam pelaksanaan dana desa penyerahan dana desa didampingi oleh bendahara desa melakukan pembayaran desa sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh sekrearis desa.

Kata Kunci: Peran Perangkat Desa,; Akuntabilitas Dana Desa

PENDAHULUAN

Dalam terciptanya desa yang maju, demokratis dan mandiri, pemerintah menyiapkan anggaran untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dimana anggaran tersebut telah diatur didalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa dan PMK No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, agar penggunaan Dana Desa dapat berjalan lebih optimal, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan berdasarkan PMK No.50/2017, penggunaan Dana Desa diutamakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa. (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2017)

Murnisari (2019) dengan judul: “Akuntabilitas pemerintahan dana desa dalam pengelolaan dana desa di kecamatan ngantru kabupaten tulungagung’ memperoleh kesimpulan bahwa: dalam penggunaan dana desa masyarakat lebih memprioritaskan untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur, selain itu masyarakat desa secara terbuka memberikan masukan dalam rencana pembangunan desa seperti yang dicantumkan dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Berdasarkan penejelasan dilatar belakang diatas, fokus dari penelitian ini yaitu Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mulai perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa candimulyo kecamatan dolopo kabupaten madiun tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Penelitian Kualitatif. Sugiyono (2017) menerangkan bahwa penelitian kualitatif merupakan cara yang dilandaskan pada filsafat Postpositivisme, dipergunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil yang di peroleh dalam penelitian lebih di tekankan pada makna.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung dengan perangkat desa yang mana mereka merupakan responden dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang berupa data data lembaga yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dari hasil penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran perangkat desa dalam akuntabilitasnya untuk mengelola dana desa di desa candimulyo kecamatan dolopo kabupaten madiun tahun 2018. Kepala desa merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap mengelola dana desa dan melaksanakan program yang sudah disepakati dalam musyawarah desa. Setelah dilakukannya musyawarah desa, Kepala Desa membentuk tim khusus untuk pelaksanaan kegiatan. Tim pelaksanaan kegiatan yaitu Kaur Pembangunan, Kepala Dusun yangbertugas untuk membuat rincian anggaran biaya, kemudian rinciananggaran biaya dibawa ke Sekretaris Desa kemudian ditanda tangani dan diverifikasi lagi ke kecamatan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan harus saling bekerja sama dengan tim pelaksanaan kegiatan, dan untuk pelaporan pertanggung jawaban itu setelah selesai dibuat oleh Sekdes, kemudian diantarkan ke Kecamatan untuk bukti tanggung jawab.

ini semua menunjukkan bahwa perangkat desa berperan aktif dalam pengelolaan dana desa. Artinya bahwa dari hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa dengan adanya peran perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas dengan baik dan transparan. Perangkat desa merupakan salah satu organ pemerintah desa, selain kepala desa. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah membaantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintah. Jenis kedudukan dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49. Jadi tidak ada lagi perangkat desa yang tidak membaantu dalam pengelolaan dana desa, dan tidak ada lagi kepala desa yang mengelolaa sendiri dana desa untuk kepentingan sepiihak. Hasil penelitian ini sejalan atau sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Mulyatii, dkk. (2017) yang berjudul Peraan Peraangkat Desa Dalam Akuntabiilitas Pengelolaan DanaDesa (Studi Pada Desa Pudariia Jaya Kecamatan Moramo). Hasil peneliitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran desa dalam akunabiilitas pengelolaan danadesa adapt dikatakan memiliki peran dalam akuntabiilitas pengelolan danadesa.

Setiap melaporkan penggunaan danadesa kepala desa sebagai wakil dari perangkat desa wajib mempertanggungjawabkan hasil dari laporan penggunaan dana desa yang telaah dibuat. Perangkat desa dalam melaksanakan pertanggungjaawaban pengelolan keuangan desa sangat berperaan dengan Permendaagri Np. 113 Tahun 2014. Laporaan pertanggungjawaaban realisasi pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disapaaikan oleh pemerintaan Desa Candimulyo merupakan suatu bentuk akuntablitas dalam pengelolaan keuaangan desa. Dalam hal ini laporan Pertanggungjwaban realisasi pelaksanaan APBDes menentukn bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau setingkat jajaraan pemerintahan diatasnya.

Tabel 5.1 Rincian Pendapatan Desa Candimulyo Tahun 2018

Sumber Dana	Jumlah
Alokasi Dana Desa	Rp. 487.663.000
Dana Desa	Rp. 737.831.000
BKK Provinsi	Rp. 41.625.000
BKK Kabupaten	Rp. 497.000.000
BHPD	Rp. 21.360.000
BHRD	Rp. 6.169.000
PADes	Rp. 497.000.000
Total	Rp. 2.028.848.00

Sumber : Pemerintah Desa Candimulyo, 2018

Jadi total pendapatan Desa Candimulyo yang harus dipertanggungjawabkan pelaporannya pada tahun 2018 sekitar Rp. 2.028.848.000 (2 Milyar).

Laporan pertanggungjwaban Realisaasi pelaksanaan APBDes tersebut juga ditetepkan dengan peraturaan desa karena dalam penyampaian laporan terseebut

pemerintah desa diwajibkan untuk melampirkan peraturan desa terkait dengan pelaksanaan APBDesa tersebut.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yaitu pendapaatan dari ADD (Alokasi DanaDesa), DD (DanaDesa) dari APBN Pusat, dan pendaapatan bantuan dari provinsi yaitu bantuan BKK (bantuan untuk jnda miiskin).

SIMPULAN

Dari hasil yang di peroleh dalam penelitian menghasilkan bahwa perangkat desa dalam akuntabilitas untuk mengelola dana desa sangat berperan besar mulai dari perencanaan, penatausahaannya, pelaporannya, pertanggungjawabannya, pengawasannya dan dalam pembinaanya. Perencanaan program dana desa di desa candimulyo telah melakukan pembangunan secara terbuka. Hal ini di buktikan dalam forum masyarakat desa banyak masyarakat yang di undang dan hadir dalam musyawarah tersebut. Selain itu dalam musyawarah desa pemerintah desa secara terbuka menerima setaip kritikan, usulan dari masyarakat dan di pecahkan setiap masalah secar abersama-sama.

Penatausahaan digunakan untuk mepertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa. Media penatausahaan di desa Cadimulyo berupa buku kas umum, buku pajak, dan buku Bank, serta bendahara setiap bulan membuat laporan petanggungjawaban bendahara. Saat pelaporan dana desa, pemerintah desa memberikan semua informasi kepada masyarakat secara terbuka terkait pembangunan apasaja yang sudah di lakukan dari penggunaan dana desa dan di pasang di papan informasi desa sehingga masyarakat dapat tahu dengan jelas.

Sedangkan tahap pelaporannya kepada pemerintah , perangkat desa candimulyo memberikan pelaporan administrasi yang rinci dalam bentuk laporan bulanan. Dan terkait Pengawasan dalam pengelolaan dana desa menunjuk inspektorat dari kabupaten madiun untuk membantu mengawasinya, selain itu juga di awasi dari dinas pemberdayaan masyarakat desa.



THE 14th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang,T,S (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Fokusmedia Bandung.
- Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, *Vol.9, No.2, 57 -65*.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik, 3(7), 1099-1104*.
- Fathah, R. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak-Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), 2(2)*.
- Irma Ade. (2015). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dikecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Penelitian. Palu Sulawesi Tengah. *Jurnal.Untad.ac.id. Vo. 3 No. 1*.
- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics, 7(2), 143-152*.
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1)*.
- Nurhayati, C (Ed). Bumdes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* (2014).
- Prasojo, S.E (Ed). (2018). Tata Pembangunan Desa. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Pusat kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2017). transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Dalam APBN
- Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. (2017). Transfer Ke Daerah & Dana Desa dalam APBN. Jakarta : Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI
- Rakhmat. (2018). *Administrasi Dan Akuntabilitas Public*. Yogyakarta : Andi



THE 14th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

- Murnisari, R. M. (2019). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 4(1), 104-121.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Winarto. (2015). *Akuntabilitas Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47-56.
- Taufik, T. (2009). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 17(01).
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40-50.
- Zara, Z. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Empat Desa pada Dua Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).